

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI TERSANGKA DI POLRESTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



Disusun Oleh :

Rini Agustine

08401244016

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ” **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI TERSANGKA DI POLRESTA YOGYAKARTA**” yang disusun oleh Rini
Agustine, NIM 08401244016 ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 19 Oktober 2012

Pembimbing,


Anang Priyanto, M.Hum
NIP: 19580910 198503 1 003


PENGESAHAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI POLRESTA YOGYAKARTA

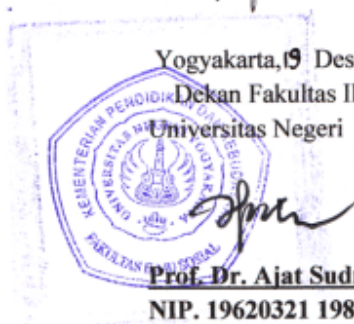
Disusun oleh:
RINI AGUSTINE
NIM. 08401244016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2012 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan.

Dewan Penguji			
Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Iffah Nur Hayati, M.Hum	Ketua Penguji		17 Desember 2012
Puji Wulandari K. S.H, M.Kn	Sekretaris Penguji		18 Desember 2012
Sri Hartini, M.Hum	Penguji Utama		17 Desember 2012
Anang Priyanto, M.Hum	Anggota		18 Desember 2012

Yogyakarta, 19 Desember 2012

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta,


Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag
NIP. 19620321 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rini Agustine

NIM : 08401244016

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta
Yogyakarta”**

merupakan karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya, karya ilmiah ini tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain atau telah dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi perguruan tinggi lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata dan etika penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, Desember 2012

Yang Menyatakan,



Rini Agustine

NIM. 08401244016

MOTTO

”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Q.S. Al-Mujadalah: 11)

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.

(Aldus Huxley)

***Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar
Sesekali liat ke belakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada
berujung.***

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas segala rahmat, hidayah dan kemudahan yang Allah SWT senantiasa berikan, karya yang penuh arti ini dipersembahkan untuk:

Yang selalu penulis banggakan Bapak Tri Mulyo dan Ibu Nani Yuniani Tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dengan kasih sayang dan penuh cinta.

Kakak dan adikku yang selalu memberikan motivasi.

Semua guruku, aku tidak akan menjadi seperti ini tanpa jasa Bapak dan Ibu

Terima kasih juga Agus Winarto yang dengan tulus membantu dan memberikan motivasi.

Sahabatku terbaik ” Mella, Amel, Winda, Olin, Bitha, kak Hengky” kemudian teman-teman seperjuanganku Wahyu Sri H., Nita, Hariyadi, Hanif, Anif, Dona, Rofa, dll. Dan sahabat terbaikku Endah Ninik (Ocha), yang selalu memberikan dukungan dan telah bersama-sama untuk menggapai cita-cita

➤Tidak lupa teman-teman seperjuangan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum angkatan 2008 yang terus harus selalu berjuang

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI POLRESTA YOGYAKARTA

**Oleh
Rini Agustine
NIM. 08401244016**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta, (2) kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dan (3) upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek penelitian yaitu Wakasat Reskrim, Polisi penyidik, Kepala Unit Penyidik I, Kepala Urusan Bina Operasional dan Penasehat hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*, dengan sumber data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif yang langkah-langkahnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang miskin dan diancam pidana lima tahun atau lebih adalah ketika Kepolisian khususnya pihak Penyidik melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, khususnya Pasal 54 dan 56. Jika tidak dilaksanakan maka mengakibatkan hak-hak tersangka tidak terlindungi sehingga dalam pelaksanaannya ditemukan kekeliruan pemberian bantuan hukum seperti keterlambatan penunjukan penasehat hukum dan dalam penyusunan BAP, Penyidik hanya dapat memberitahukan tersangka untuk menerima bantuan hukum namun tidak menyediakan bantuan hukum. 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta yaitu terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta yakni Rp 3.000.000,00 perkasus padahal seharusnya Rp. 5.000.000,00 perkasus, ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta belum tercukupi, ada sebagian penyidik kurang memahami tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu(miskin). 3) Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta yaitu, mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang miskin di Polresta Yogyakarta, meningkatkan koordinasi antara kepolisian dan Lembaga Bantuan Hukum, meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan sosialisasi anggota kepolisian tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan rahmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi (TAS) yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan untuk kuliah kepada penulis di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf yang telah berkenan memberikan izin dan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Samsuri, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang telah memfasilitasi dan memberi motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
4. Bapak Anang Priyanto, M.Hum selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan membimbing, memberi kepercayaan, saran, motivasi serta nasehat-nasehat yang bermanfaat.
5. Ibu Sri Hartini, M.Hum selaku penguji utama yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Ibu Iffah Nurhayati, M.Hum selaku ketua penguji memberikan motivasi, dukungan, saran dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Ibu Puji Wulandari K, M.Kn selaku sekretaris penguji yang telah yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.

8. Bapak Halili S.Pd selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
9. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama berkuliah di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum.
10. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta, yang telah banyak mendukung kuliah saya dan berkat segala doa mereka, penulis dapat mencapai kesuksesan di setiap gerak langkah untuk mencapai cita-cita.
11. Teman, sahabat, sekaligus saudaraku, yang telah memberi dukungan, semangat, ketulusan, kebersamaan, dan kebahagiaan dalam menjalani sebagian tahap kehidupanku.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum angkatan 2008 yang selalu menemani dan memberi kasih sayang.
13. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Atas bantuan, dukungan, bimbingan, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan semoga Allah SWT senantiasa memberi balasan sebaik-baiknya. Semoga karya tulis ini memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan kajian atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Desember 2012
Penulis

Rini Agustine

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
G. Batasan Istilah	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan tentang Bantuan Hukum.....	18
1. Pengertian Bantuan Hukum	18
2. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum	23
3. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	24
4. Tata Cara Pemberian Bantuan hukum.....	28
B. Tinjauan tentang Penasehat Hukum.....	30
1. Pengertian Penasehat Hukum.....	30
C. Tinjauan tentang Tersangka	31
1. Pengertian Tersangka	31
2. Hak-hak Tersangka	31
D. Tinjauan tentang Kepolisian	34
1. Pengertian Polisi	34
2. Tugas Polisi	36
3. Wewenang Polisi	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
C. Penentuan Subjek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Wawancara.....	47
2. Dokumentasi.....	48
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	49
F. Teknik Analisis Data	50
1. Reduksi Data.....	51
2. Unitisasi /Kategorisasi Data.....	51
3. Display Data/Penyajian Data.....	51
4. Pengambilan Kesimpulan.....	52
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 54
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	54
1. Profil Polresta Yogyakarta.....	53
2. Profil Satuan Reserse kriminal (Sat Reskrim) Polresta Yogyakarta	57
B. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta	67
C. Kendala-kendala yang Ditemui Polresta Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta.....	80
D. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta.....	83
 BAB V PENUTUP	 87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	 94
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1 . Struktur Organisasi Revisi Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.....	61
2. Proses Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kejahatan Tahun 2010-2011 Satuan Reserse Kriminal di Polresta Yogyakarta dengan Ancaman Pidana Lima Tahun atau Lebih.....	8
2. Beberapa Uraian Kasus Kejahatan Tahun 2010 -2011 Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta yang Diancam Pidana Lima Tahun atau Lebih	10
3. Data Personel Sat Reskrim Yogyakarta Tahun 2011.....	64
4. Beberapa Uraian Kasus Kejahatan Tahun 2010 -2011 Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta yang Diancam Pidana Lima Tahun atau Lebih	73
5. Anggaran dana Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) dan diancam pidana lima tahun atau lebih di Polresta Yogyakarta	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara Polresta Yogyakarta... ..	96
2. Contoh Surat Penunjukan Penasehat Hukum.....	98
3. Contoh Surat Pernyataan tidak Menggunakan Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta	99
4. Struktur Revisi Organisasi Sat Reskrim.....	100
5. Surat Ijin Penelitian.....	101
6. Surat Penelitian dari Polresta Yogyakarta.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara hukum, proses pembangunan nasional yang terus-menerus dilaksanakan menimbulkan konsekuensi terhadap terjadinya proses perubahan dan pembaharuan terhadap seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum. Apabila mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, maka akan terlihat dengan jelas keterlibatan hukum secara aktif dan meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional dibidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk

membela hak-haknya. Golongan yang berbeda inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah hukum khususnya tindak pidana. Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dewasa ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan di televisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan perkosaan dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasihat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka diancam dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang sama dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah (Djoko Prakoso, 1985: 28).

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada awal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.”

Oleh karena itu, jika penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum, maka bantuan hukum tidak terlaksana ataupun bisa terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin), di keluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.

Bagi tersangka yang tidak mampu (miskin), bantuan hukum menjadi hak tersangka yang menjadi suatu kewajiban yang diberikan penyidik karena telah diatur dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum sebagai pemberi bantuan hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Selain itu, ada pasal yang mengkhususkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal pendampingan hukum yang tercantum Pasal 56 ayat (2) KUHAP yakni,

“penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Kemudian untuk golongan mampu, pendampingan hukum merupakan hak yang diperoleh tersangka untuk menunjuk pengacara yang mereka bayar sendiri tanpa campur tangan pihak kepolisian.

Menurut ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan untuk usaha memperoleh bantuan hukum. Dari banyaknya hak-hak tersangka atau terdakwa inilah, menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik (2010: 25), dikemukakan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak saudara dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan;
2. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak saudara;
3. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya;
5. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian;
6. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan bebas;
7. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana.

Dari hak-hak tersangka di atas khususnya nomor 2 (dua), tersangka berhak meminta bantuan hukum sebagai pembelanya. Dalam hal ini, pemberian bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

Bantuan hukum menjadi sangat penting ketika tersangka dalam proses pemeriksaan menghadapi para aparat hukum. Oleh karena itu seorang tersangka perlu pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang. Apabila kedudukan antara tersangka dan penegak hukum tidak seimbang, maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam proses hukum tersebut. Dalam memenuhi hak dan

kewajiban tersebut maka tersangka dan terdakwa harus memperoleh bantuan hukum secukupnya. Menurut aturan hukum yang berlaku, untuk memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya dalam setiap tingkat pemeriksaan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas karena tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan hukum dengan menunjuk penasihat hukum atau pembela bagi tersangka untuk menekan resiko terjadi penyiksaan atau pemaksaan dari petugas terhadap tersangka.

Uraian di atas menjelaskan betapa pentingnya bantuan hukum bagi tersangka. Hal ini juga dapat dilihat dari kasus sidang perdana Iwan Walet yang ditunda oleh pengadilan. Penundaan tersebut akibat dari terdakwa yang tidak ada pendampingan hukum. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aktivis Islam Solo pada bulan Mei 2012 silam atau yang lebih dikenal dengan Kasus Gandekan Solo dengan terdakwa utama yakni Preman Kafir Iwan Walet yang mulai disidangkan Selasa (28/08/2012) jam 09.00 WIB di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Kasus tersebut menceritakan tentang terdakwanya yang mengalami penundaan sidang akibat terdakwa meminta permohonan untuk didampingi penasihat hukum. Terdakwa dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan hukuman penjara 5 tahun 9 bulan. Sebelumnya pada saat tahap penyidikan mereka tidak didampingi penasihat hukum sehingga tidak adanya pembelaan bagi kedua terdakwa sampai tahap persidangan.

Terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum padahal terdakwa tersebut berasal dari warga miskin yang harus dibantu menggunakan bantuan hukum (<http://arrahmah.com/read/2012/08/29/22766-tak-didampingi-kuasa-hukum-sidang-perdana-iwan-waletditunda.html>#diakses tanggal 20 September 2012). Menurut kasus di atas, pihak penyidik sendiri telah menawarkan pemberian bantuan hukum namun tersangka pada saat itu tidak ingin didampingi padahal pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan perlu adanya pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang kurang mampu.

Faktanya di lingkup Wilayah Hukum Kota Yogyakarta pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi penting. Di Polresta Yogyakarta, banyak kasus yang tersangkanya dihukum dan diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun sehingga perlu adanya bantuan hukum yang mendampingi mereka. Di bawah ini merupakan kasus-kasus tindak pidana yang dihadapi Polresta Yogyakarta pada tahun 2010 dan 2011 yang menangani kasus kriminalitas tindak pidana umum sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kejahatan Tahun 2010-2011 Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta dengan Ancaman Pidana Lima Tahun atau Lebih

No	Kasus	Tahun 2010	Tahun 2011
		Jumlah kejahatan	Jumlah kejahatan
1	Pengeroyokan	90	93
2.	Kebakaran	18	15
3.	Uang palsu	2	1
4.	Perkosaan	2	5
5.	Perjudian	14	28
6.	Pembunuhan dan penganiayaan	1	4
7.	Penganiayaan berat	1	2
8.	Pencurian berat	363	239
9.	Pencurian dengan kekerasan	107	135
10.	Penggelapan dan Penipuan	697	595
12.	KDRT	46	37
13.	Kesusilaan	4	2
14	Curanmor	197	231
	Jumlah	1542	1387

(Sumber: Data Sat Reskrim Polresta Yogyakarta diambil pada tanggal 28 Juni 2012)

Dari Tabel 1 (satu) di atas diambil beberapa uraian kasus-kasus tindak pidana yang tersangkanya tidak mampu (miskin) dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih. Dalam Tabel di bawah ini diambil beberapa kasus yaitu kasus perjudian, pencurian kendaraan bermotor (pencurian mobil), kasus penipuan dan penggelapan uang, kasus penganiayaan. Tindak pidana tersebut merupakan beberapa kasus yang dihadapi Sat Reskrim Polresta Yogyakarta yang akan diuraikan beberapa kasusnya sebagai berikut:

Tabel 2. Beberapa Uraian Kasus Kejahatan Tahun 2010 -2011 Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta yang Diancam Pidana Lima Tahun atau Lebih

No.	Tgl.	No/Tgl./LP	Kasus	Tersangka	Korban	Bantuan Hukum
1	18 Oktober 2010	LP-B/19/XI/2009/DIY. Tabes/SEK MG/22 November 2010	Curanmor Melanggar Pasal 363 KUHP	Redi Setiawan	Endang Sukeni	Tidak didampingi bantuan hukum
2	18 Oktober 2010	Lp/17/III/2010/DIY /Tbs Yka/Sek Jt/ 19 Maret 2010	Jambret Melanggar 362 Pasal KUHP	Bhaskara Firmansyah	Surya Ismiko	Tidak didampingi bantuan hukum
3	2 Februari 2011	LP/05/1/2011/DIY/ Resta Yka 3 Januari 2011	Penganiayaan Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP	Endra Eka Putra	Warjito Edi	Tidak didampingi bantuan hukum
4	25 Mei 2011	LP/149-B/III/2011/DIY/ Resta Yka/ SEK Gt	Curanmor Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP	Bambang Sucipto	Agung Nurmantoro	didampingi bantuan hukum
5	20 Juni 2011	LP/180/IV/2011/DI Y/Resta Yka/ SEK UH 16 April 2011	Curanmor Melanggar Pasal 363 KUHP	Reno Saktiawan	Ponijan	Tidak didampingi bantuan hukum
6	30 Juni 2011	LP/ 48/ II/ 2011/ DIY/ Resta Yka 15 Februari 2011	Curanmor Melanggar Pasal 363 KUHP	Agung Prasetyo	Ali Umar	Tidak didampingi bantuan hukum
7	20 Juli 2011	LP/ 191 B/ IV/ 2011/ DIY/ Resta Yka 30 April 2011	Pembunuhan Melanggar Pasal 340 Sub Pasal 351 Ayat (3) KUHP	Joko Wibowo	Mamudin	tidak didampingi bantuan hukum
8	15 September 2011	LP/47-B/XI/2010/ DIY/ Tabes Yka / Sek WB 8 September 2011	Curanmor Melanggar Pasal 363 KUHP	Frendy	Sumary	Tidak didampingi bantuan hukum
9	1 November 2011	LP/70/VIII/2011/DI Y/Resta/SEK	Curanmor Melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP	Mohammad Lokman	Heri Mardiyanta	Tidak didampingi bantuan hukum
10	22 Desember 2011	LP/496-B/XI/2011/DIY/Res ta Yka 1 November 2011	Curanmor Melanggar Pasal 363 KUHP	Gatot dan Rohmat Hadiatmoko	Novi Andika sakti	didampingi bantuan hukum

(Sumber: Data Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, data diambil tanggal 28 Juni 2012).

Dari Tabel 2 (dua) di atas dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana di atas merupakan beberapa kasus kriminal yang tersangkanya tidak mampu (miskin) yang ditangani Polresta Yogyakarta pada tahun 2010 dan 2011. Pada kenyataannya, dari 8 (delapan) contoh kasus di atas, 6 (enam) diantaranya tersangka belum mendapat bantuan hukum sehingga tidak didampingi penasehat hukum dan 2 (dua) diantaranya sudah didampingi tetapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukumnya masih belum optimal karena masih ada tersangka yang miskin dan diancam pidana lima tahun atau lebih belum didampingi bantuan hukum. Hal ini yang menjadi suatu permasalahan di mana bantuan hukum diperlukan terutama jika tersangkanya dihukum minimal 5 (lima) tahun hukuman penjara bahkan lebih.

Bagi tersangka yang tidak mampu (miskin), sesuai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik berkewajiban untuk menyediakan penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin). Bantuan hukum sebagai alat untuk membela kepentingan tersangka, sebaiknya dipergunakan sebagaimana mestinya demi berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan dengan optimal agar tersangka yang tidak mampu dapat diberi bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat (1).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Minimnya perhatian dari Pemerintah tentang bantuan hukum di Polresta Yogyakarta.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Polisi Penyidik di Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan pendampingan hukum bagi tersangka yang tidak mampu dan diancam hukuman lebih dari lima tahun.
3. Tersangka tidak mengerti tentang hak-haknya untuk mendapat bantuan hukum.
4. Adanya kendala yang dihadapi oleh Polresta Yogyakarta dalam mewujudkan bantuan hukum, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan peneliti, baik itu keterbatasan yang bersifat materi seperti dalam hal yang terkait dengan biaya penelitian, dan keterbatasan yang bersifat non-materi seperti masalah efisiensi waktu untuk penelitian, maka agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana, tentunya perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Polisi Penyidik di Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan pendampingan hukum bagi tersangka yang tidak mampu dan diancam hukuman lebih dari lima tahun.
2. Adanya kendala yang dihadapi oleh Polresta Yogyakarta dalam mewujudkan bantuan hukum, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, perumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta ?
3. Bagaimana upaya Polresta Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui upaya Polresta Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan tambahan pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah khasanah ilmu pengetahuan serta pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Acara Pidana terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta. Penelitian ini juga berfungsi menambah pengetahuan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dalam kaitannya materi hukum pidana yaitu norma hukum.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, lembaga kepolisian dan masyarakat.

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan suatu bentuk sarana berfikir secara ilmiah dan bentuk penerapan keilmuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan peneliti khususnya di bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) rumpun hukum sebagai bekal pengetahuan calon tenaga pengajar PKn di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) .

b. Manfaat bagi lembaga kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan Kepolisian dalam mengambil kebijakan yang terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam hal bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, serta mengetahui tentang hak-haknya ketika seseorang menjadi tersangka.

G. Batasan Istilah

Untuk kepentingan menghindari adanya *multi-interpretasi* atas judul penelitian ini, secara etimologis peneliti akan memberikan paparan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 281) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah proses pemberian bantuan hukum dari penyidik kepada tersangka yang tidak mampu (miskin) oleh Pemberi Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta.

2. Bantuan Hukum

Pasal 1 (angka 1) Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tujuan bantuan hukum di sini adalah sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin, menurut hukum yang berlaku, dengan berlandaskan kemanusiaan.

Bantuan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bantuan hukum yang digolongkan dalam jenis *Legal Aid* yakni:

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- 2) Bantuan ini lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- 3) Motivasi dari bantuan hukum *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum.

2. Tersangka

Pengertian tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian tersangka dalam judul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta adalah tersangka yang tidak mampu (miskin) dan diancam pidana lima tahun atau lebih yang menerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta secara keseluruhan adalah pelaksanaan pemberian jasa hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu perlu pemberian bantuan hukum bagi tersangka secara cuma-cuma.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir dalam buku Pendidikan Keadvokatan (2010: 13) bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga Negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bantuan hukum hanya mengatur mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud bantuan hukum itu sendiri seperti yang terdapat pada Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi:

“penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Oleh karena itu, dibangun suatu konsep bantuan hukum.

Pada dasarnya baik di Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model sistem bantuan hukum yakni:

1) *A Juridicial Right* (model yuridis-idividual)

Model ini menekankan pada sifat individualistis maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum, tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya, mereka menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan jasa-jasa yang diberikannya kepada negara. Jadi bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.

2) *A Welfare Right* (model kesejahteraan)

Sistem hukum di Amerika Serikat ini berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan itu mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah. Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara (Soerjono Soekanto, 1983 :11).

Bila melihat kedua model tersebut maka, dapat diambil kesimpulan, dimana disatu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan pada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan.

Adapun pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah berbeda (M.Yahya Harahap, 2002: 334), yaitu:

1) *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kekurangan keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Jadi, *legal aid* berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini :

- a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
- b) Bantuan ini lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin
- c) Motivasi dari bantuan hukum *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum.

2) *Legal assistance*

Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian dari seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada kondisi seseorang yang miskin melainkan kepada siapa saja tanpa terkecuali.

3) *Legal service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan istilah ini “*Legal service*” (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994:9) memiliki makna lebih luas yakni pelayanan hukum sebagai bentuk jasa oleh kaum

profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud menjamin agar tidak seorangpun didalam masyarakat terampas hak-haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum. Istilah *legal service* yang terkandung makna dan tujuan :

- a) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang berpenghasilan besar.
- b) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukm bagi setiap anggota masyarakat yang membedakan kaya dan miskin
- c) Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang diberikan hukum kepada setiap orang. Legal service lebih cenderung menyelesaikan persengketaan dengan menempuh jalan damai.

Pengertian Bantuan Hukum juga dapat dilihat dalam Undang-Undang terbaru tentang Bantuan Hukum yakni Undang-undang Nomor 16 tahun 2011.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini. Adapun syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum (Pasal 15 ayat (5) serta tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum (Pasal 18).

Berikut adalah pengertian Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yaitu:

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Meskipun tidak didapat pengertian yang pasti mengenai apa yang dimaksud bantuan hukum, namun secara umum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum arti bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Bantuan ini memberikan jasa untuk :

- Memberikan nasehat hukum
- Bertindak sebagai pendamping dan pembela seorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana. Sebagai pembela atau penasihat hukum harus memberikan pengarahan-pengarahan dan penjelasan-penjelasan tentang kedudukan persoalannya. (<http://www.library.upnvj.ac.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2012).

Melalui uraian berikut pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta, menurut teori yang dikemukakan di atas pengertian bantuan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bantuan hukum yang digolongkan dalam jenis *Legal Aid* yakni:

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- 2) Bantuan ini lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- 3) Motivasi dari bantuan hukum *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum.

2. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan melihat tujuan dari suatu bantuan hukum dapat diketahui kalau tujuan hukum tidak lagi didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya, pengertian yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Indonesia.

3. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (miskin) dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :
 - 1) Pasal 56
 - (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
 - (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidakmampu.

2) Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- 1) Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- 2) Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- 3) Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 114 yang berisi tentang dalam seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidikm penyidik wajib memberitahukan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Dalam KUHAP terutama dalam bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 terdapat ketentuan mengenai Bantuan Hukum. Dalam pasal-pasal KUHAP tersebut diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan wujud dari bantuan hukum.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP sebagai berikut :

- a) Mengenai hak memperoleh bantuan hukum terdapat dalam Pasal-pasal 54,55,56,57,59,60 dan 114 KUHAP. Didalam pasal-pasal tersebut secara tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh

karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan.

- b) Waktu pemberian bantuan hukum terdapat dalam Pasal 69 dan 70 ayat (1). Menurut ketentuan pasal tersebut bahwa bantuan hukum kepada seorang yang tersangkut suatu perkara pidana sudah dapat diberikan bantuan hukum sejak ditangkap atau ditahan. Penasehat hukum dapat berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
- c) Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 71. Dalam ketentuan ini dimaksudkan agar penasehat hukum benar-benar memanfaatkan hubungan dengan tersangka untuk kepentingan daripada pemeriksaan. Bukan untuk meyalahgunakan haknya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan.
- d) Wujud dari bantuan hukum disini adalah perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasehat hukum terhadap perkara yang dihadapi tersangka, yaitu:
 - (1) Pada Pasal 115 mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar kecuali kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum hanya dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar;
 - (2) Pasal 123, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka oleh penyidik yang melakukan penahanan

- (3) Pasal 79 dan 124, penasehat hukum dapat mengajukan permohonan untuk diadakan praperadilan;
- (4) Penasehat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi buat tersangka atau terdakwa sehubungan dengan pasal 95, 97, dan 79;
- (5) Pasal 156, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima;
- (6) Pasal 182, penasehat hukum dapat mengajukan pembelaan;
- (7) Pasal 233, penasehat hukum dapat mengajukan banding;
- (8) Pasal 245, penasehat hukum dapat mengajukan kasasi;

4. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Tata cara pemberian Bantuan Hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 19, yang isinya sebagai berikut :

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Kemudian dalam Pasal 15 berbunyi,

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pendanaan Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 16, 17, 18, 19 dimana Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Isi dari pasal mengenai pendanaan tersebut sendiri dalam Pasal 16 yaitu:

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan untuk bantuan hukum juga terlihat dalam Pasal 17 yang berbunyi;

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Namun, terkait dengan pendanaan tersebut, Negara tidak wajib mengalokasikan dananya untuk bantuan hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah

B. Tinjauan tentang Penasehat Hukum

1. Pengertian Penasehat Hukum

Pengertian Penasehat hukum atau biasa disebut Advokat menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang

untuk memberi bantuan hukum. Kemudian menurut Frans Hendra Winarta, dalam pekerjaan legal counseling (konsultan hukum) sudah termasuk didalamnya mendampingi, membantu, dan menyatakan salah atau tidak bersalah seseorang di Pengadilan maupun sidang umum lainnya (Ishaq, 2010: 3).

Melihat pengertian penasehat hukum diatas maka yang dimaksud penasehat hukum dalam penelitian ini adalah orang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang (pemberi bantuan hukum) untuk memberi bantuan hukum/jasa hukum kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu secara cuma-cuma.

C. Tinjauan tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP). Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan (butir 15).

Tersangka dalam judul pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta adalah tersangka yang miskin dan diancam pidana lebih dari lima tahun atau lebih dan menerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum.

2. Hak-hak Tersangka

Ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan untuk usaha memperoleh bantuan hukum. Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa yang diberikan oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan beberapa Pasal lainnya yaitu sebagai berikut :

- b. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP)
- c. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)
- d. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- e. Hak mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
- f. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- g. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.
- h. Wajib mendapat bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bai yang

tidak mampu diancam lima tahun atau lebih berhak mendapat bantuan secara cuma-cuma (Pasal 56).

- i. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak saudara dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan.
- j. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak saudara.
- k. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- l. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.
- m. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian.
- n. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan bebas.
- o. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana.

Dari hak-hak tersangka diatas, mencantumkan bahwa tersangka berhak meminta bantuan hukum sebagai pembelanya. Dalam hal ini,

pelaksanaan pemberian bantuan hukum sangat penting dimana bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

D. Tinjauan tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009: 111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Raharjo, 2009:117).

Menurut menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya terkait dengan polisi, bagian Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres.
- b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- c. penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim.

Sat Reskrim di pimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali waka polres. Kasat Reskrim di bantu oleh Kaur Bin Ops disingkat KBO yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.

2. Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c) Membina masyarakat untuk peningkatan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian;

- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menunjang hak-hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;

3.Wewenang Polisi

Di samping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, polisi juga memiliki wewenang sebagai berikut :

- (1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- (2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- (3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- (4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- (9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- (10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- (11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- (12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Polisi penyidik bertugas untuk memberitahukan hak-hak kepada tersangka, yaitu dilakukan pada saat dimulainya pemeriksaan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 114 KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal seorang tersangka melakukan suatu tindak pidana sebelumnya dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Kemudian dalam tahap pemeriksaan tersebut dapat dijelaskan bahwa polisi penyidik berwenang memberitahukan hak-hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum berlandaskan persamaan derajat dan kedudukan antara penasehat hukum dengan penyidik yang merupakan permasalahan dalam pemberian bantuan hukum.

Kemudian polisi penyidik dalam pelaksanaan Bantuan hukum dapat dilihat dalam Pasal 115 KUHAP :

Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar jalannya pemeriksaan.

Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Ketentuan Pasal 115 tersebut merupakan prosedur yang ditetapkan bahwa polisi penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat didampingi penasehat hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Wilayah Kota Yogyakarta, yaitu dilakukan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta terletak di Jl. Reksobayan Nomor 1 (Ngupasan, Gondomanan), Yogyakarta, DI Yogyakarta 55121. Peneliti memilih penelitian di Polresta wilayah Hukum Kota Yogyakarta karena Polresta tersebut merupakan kepolisian dalam ruang lingkup Kota Besar Yogyakarta dimana banyak tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang belum mendapat bantuan hukum, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum kurang optimal. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2012.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang seteliti mungkin tentang manusia atau suatu keadaan (Rianto Adi, 2004: 58). Menurut Suharsimi Arikunto (1991: 25) penelitian deskriptif merupakan penelitian apabila

peneliti bermaksud mengetahui keadaan suatu data dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J Moleong, 2010: 6). Menurut Sugiyono (2009: 9) Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Filsafat Postpositivisme sering juga disebut sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala yang bersifat interaktif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian tentang ucapan, tulisan yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik (Bodgan dan Taylor, dalam Basrowi & Suwardi, 2008 : 23).

Berdasarkan jenis dan metode penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

C. Penentuan Subjek Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Yogyakarta. Maka penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah pemilihan subjek penelitian yang mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Lexy J. Moleong, 2005: 224).

Teknik *purposive* dilakukan untuk menentukan subjek penelitian. Subjek penelitian awal yang dipilih dengan teknik *purposive* adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, memahami dan menangani langsung tentang permasalahan yang diteliti. Kriteria yang ditetapkan peneliti sebagai dasar pertimbangan penentuan subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Orang atau petugas yang bertanggung jawab menangani perkara pidana yang tersangkanya diancam pidana lebih dari 5 tahun.
2. Orang atau pejabat yang berhubungan dan mengurus data kasus perkara tindak pidana di Polresta Yogyakarta dan mengetahui kendala-kendala pelaksanaan bantuan hukum di Polresta Yogyakarta .
3. Orang atau pejabat yang memberikan jasa Bantuan hukum di Polresta Yogyakarta.

Berdasarkan kriteria subjek penelitian diatas, maka subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni:

1. Wakasat Reskrim sebagai Polisi penyidik yang bertugas di Polresta Yogyakarta yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi yang menangani perkara tindak pidana umum.
2. Polisi penyidik yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi yang berpengalaman menangani tindak pidana umum di Polresta Yogyakarta.
3. Kepala Unit Penyidik I yang bertugas melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
4. Kepala Urusan Bina Operasional yang bertugas membantu kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
5. Seorang Penasehat hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) di Polresta Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi :

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Lexy J. Moleong, 2010: 190). Dalam wawancara terstruktur memuat permasalahan pokok dalam penelitian yaitu pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta. Kemudian, dari wawancara tersebut didapatkan data yang lengkap dari semua subjek penelitian sebagai sumber penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan polisi yang berada di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta yang bertugas menangani perkara pidana, dengan Kepala Bina Operasional, dengan penasehat hukum. Dalam hal ini Polisi dan penasehat hukum tersebut menjadi subjek utama penelitian. Wawancara dilakukan di ruang penyidikan di bagian Reskrim Polresta Yogyakarta pada waktu subjek penelitian sedang bersama penasehat hukum.

Langkah-langkah yang dilakukan saat wawancara di Polresta Yogyakarta yaitu:

- a. Wawancara dalam penelitian ini diajukan kepada Wakasat Reskrim, Polisi penyidik, Kepala Unit Penyidik I, Kepala Urusan Bina Operasional dan Penasehat hukum;

- b. Wawancara dilakukan satu persatu dengan waktu menyesuaikan jadwal subjek penelitian;
- c. Wawancara dilakukan dengan duduk berhadapan;
- d. Peneliti mengajukan pertanyaan dengan pedoman wawancara seputar pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta serta upaya-upaya yang dilakukan Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta
- e. Peneliti mencatat hal-hal penting sesuai dengan pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Metode ini adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen (Basrowi & Suwandi, 2008: 158). Data ini diperoleh dari data wawancara terstruktur yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta. Adapun dokumen yang dimaksud disini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003
- d. Surat penunjukan Penasehat Hukum

- e. Data mengenai jumlah kasus Kejahatan Sat Reskrim Polresta Yogyakarta pada tahun 2010-2011
- f. Data Uraian mengenai kejahatan tahun 2010-2011 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta
- g. Pembaharuan Struktur Organisasi Sat Reskrim di Polresta Yogyakarta.
- h. Berkas Acara Pemeriksaan No. perkara: LP /149-B/III/2011/DIY/ Resta Yka/ SEK Gt
- i. Berkas Acara Pemeriksaan No. perkara: LP/ 191 B/ IV/ 2011/DIY/ Resta Yka
- j. Data anggaran pemberian bantuan hukum di Polresta Yogyakarta.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dari data yang ada terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan data. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik *cross check* data. *Cross check* adalah upaya mendapatkan data-data yang valid dengan cara menanyakan kepada subjek penelitian pertama dan kedua sama, maka data yang diperoleh valid, dan sebaliknya (Sanapiyah Faisal, 1990: 192). Teknik ini digunakan karena dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Agar keabsahan data tersebut terjamin akurat dan telah sesuai dengan data yang ada, maka dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan pemberian

bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta dilakukan *cross check*.

Dalam penelitian ini, agar keabsahan data terjamin akurat dan telah sesuai dengan data yang ada, maka hasil dokumentasi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta dilakukan *cross check* dengan hasil wawancara. *Cross check* dapat dilakukan antar subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lain dan antara hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh selama penelitian yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Yogyakarta.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan proses kerja itu (Bogdan dan Taylor, dalam Lexy J. Moleong. 2010: 280). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif. Analisis induktif dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian serta pentransportasian data kasar dari lapangan (Basrowi dan Suwandi, 2008: 208). Data yang diperoleh dari wawancara polisi dan pengacara serta dokumentasi merupakan data mentah yang masih bersifat acak-acakan dan harus diolah. Untuk itu peneliti memilih data yang menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta selanjutnya data tersebut disederhanakan.

2. Unitisasi / Kategorisasi Data

Data wawancara dan dokumentasi yang telah disederhanakan kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Data tersebut disusun secara sistematis ke dalam kategori dengan sifat masing-masing yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat penting dan pokok. Sehingga data dapat memberi gambaran penelitian yang jelas mengenai mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

3. Display Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebagaimana halnya dengan reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidak terpisah dari kegiatan

analisis. Display data dilakukan dengan melihat gambaran keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam laporan yang sistematis untuk selanjutnya dan ditarik kesimpulan (Burhan Bungin, 2003: 70). Data disajikan dalam bentuk narasi yang berupa informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta, apa sajakah kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka dan bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

4. Pengambilan Kesimpulan

Data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif sesuai dengan fakta, kemudian kesimpulan ini diidentifikasi dengan cara melihat kembali pada reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta, apa sajakah kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka dan bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi kendala-

kendala dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Polresta Yogyakarta

Wilayah Kota Yogyakarta berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) salah satu daerah yang berotonomi khusus. Terletak di tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah astronomis Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 110.24°9' sampai 110.20°52' Bujur Timur dan 07.49°46' sampai 07.15°24' Lintang Selatan. Ketinggian wilayahnya rata-rata 114 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang berpenduduk padat. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinkapil) Kota Yogyakarta, jumlah penduduk hingga akhir tahun 2011 sebanyak 440.143 jiwa (<http://www.republika.co.id> diakses tanggal 3 Juli 2012). Banyaknya penduduk tersebut memungkinkan tingkat kriminalitas semakin tinggi dan berkaitan dengan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta dilaksanakan di Wilayah Kota Yogyakarta, yaitu dilakukan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta (Bagian Reserse) terletak di Jl. Reksobayan No. 1 (Ngupasan, Gondomanan), Yogyakarta, DI Yogyakarta 55121.

a. VisidanMisiPolresta Yogyakarta

“Visi Polresta Yogyakarta”

Senantiasa Melindungi, Menegakkan Hukum dan Melayani Masyarakat untuk mewujudkan Keamanan dan Ketertiban.

“Misi Polresta Yogyakarta”

- 1) Mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol.
- 2) Meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, *illegal logging, illegal fishing, illegal minning, dan human trafficking*.
- 3) Penguatan kemampuan Densus 88 dengan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

b. Wilayah HukumPolresta Yogyakarta

Dalam menjalani tugasnya sebagai pengayom dan melayani masyarakat, Polresta Yogyakarta menaungi beberapa Polsek dibawah lingkup wilayahnya. Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta sendiri terbagi menjadi 14 (empat belas) sektor berdasarkan Wilayah Kota Yogyakarta itu sendiri yaitu :

- 1) Polsekta Gondomanan terletak di Jl. Lobaningratan No. 1 GM Yogyakarta. Telp : (0274) 375376
- 2) Polsekta Wirobrajan terletak di Jl. Kapten Tendean No. 595 WB Yogyakarta Telp : (0274) 374 832
- 3) Polsekta Pakualaman terletak di Jl. Purwanggan No. 53 PA yogyakarta. Telp : 513178

- 4) Polsekta kotagede terletak di Jl. Nyi Pembayun No. 34 KG Yogyakarta.
Telp : (0274) 589 609
- 5) Polsekta Umbulharjoterletak di Jl. Menteri Supeno No. 105 UH
Yogyakarta. Telp (0274) 373 916
- 6) Polsekta Danurejanterletak di Jl. Krasak timur No 40 DN Yogyakarta.
Telp : (0274) 589 609
- 7) Polsekta Gedongtengenterletak di Jl.Jlagran no. 12 GT Yogyakarta.
Telp (0274) 512 696
- 8) Polsekta Kratonterletak di Jl. Kadipaten Kidul No. 373 KT
Yogyakarta. Telp (0274) 373 793
- 9) Polsekta Jetisterletak di Jl. Kyai Mojo No.5 JT Yogyakarta. Telp :
(0274) 513 136
- 10) Polsekta Tegalrejo terletak di Jl. Magelang No. 184 TR Yogyakarta.
Telp: (0274) 513877
- 11) Polsekta Ngampilan terletak di Jl. KS. Tubun No.28 NG Yogyakarta.
Telp: (0274) 512185
- 12) Polsekta Gondokusuman terletak di jl. Mlati wetan No. 6 GK
Yogyakarta. Telp (0274) 513 125
- 13) Polsekta Mantrijeron terletak di Jl. DI. Panjaaitan No.1 MJ
Yogyakarta. Telp : (0274) 374167
- 14) Polsekta Mergangsan terletak di Jl. Sisingamangaraja MG Yogyakarta.

2. Profil Satuan Reserse Kriminal(Sat Reskrim) Polresta Yogyakarta

Satuan Reserse Kriminal atau sering disebut Sat Reskrim adalah unsur pelaksana utama polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reserse Krimimina; bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan adminitrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya yang dimaksud Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan fungsi atau penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres.
- b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.

- e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari atau mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim.

Selain fungsi Reserse Kriminal diatas, Bagian Satuan Reserse Kriminal atau disingkat Sat Reskrim memiliki Panca siap bidang Reskrim sebagai motto dalam menjalankan semua tugasnya, motto tersebut yakni :

- 1) Siap Diri

Siap diri dalam Panca Siap Bidang Reskrim adalah Polisi harus selalu menyiapkan dirinya dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya dibidang kriminalitas termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan harus selalu siap dan melayani warga masyarakat sebaik mungkin demi kelancaran penanganan kasus tindak pidana.

- 2) Siap Mako

Siap Mako dalam Panca Siap bidang Reskrim adalah menyiapkan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan penyelesaian kasus kriminal menurut bidangnya masing-masing dan dalam hal melayani kepentingan masyarakat.

- 3) Siap Data

Dalam hal ini bagian Sat Reskrim yang bertugas mempersiapkan data yang dibutuhkan misalnya melaksanakan pemanggilan,

pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi, Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan, menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unit pembinaan operasional dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain, melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari, menyiapkan data-data yang ditangani.

4) Siap Siaga

Dalam hal ini anggota Sat Reskrim harus selalu siap siaga dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pelayanan terhadap masyarakat dibidang kriminalitas, menangani kasus-kasus, serta harus selalu tanggap jika terdapat kejahatan di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

5) Siap Opsnal

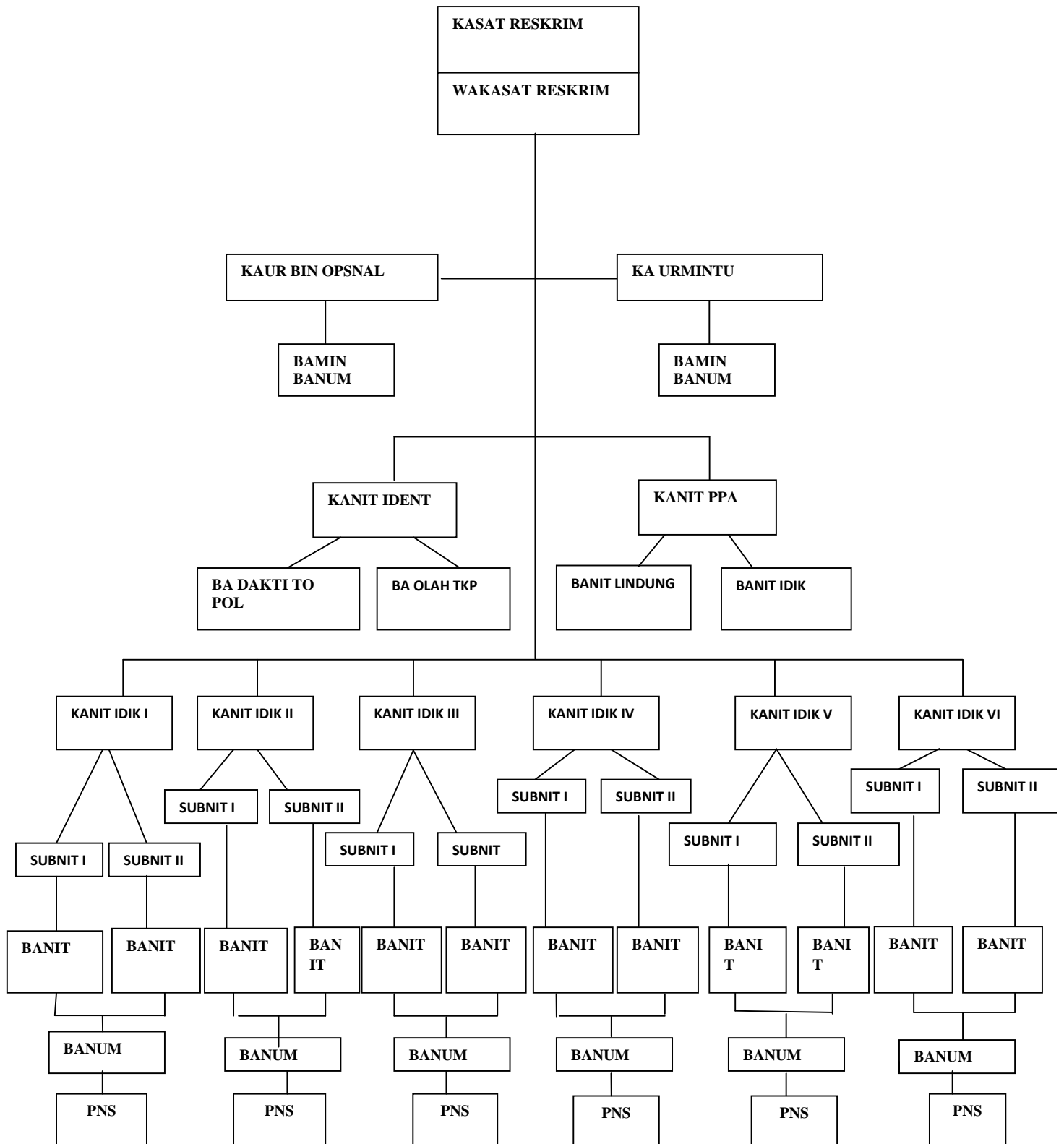
Siap Opsnal merupakan kepanjangan dari Siap Operasional, maksudnya anggota Satuan Reserse Kriminal selalu siap melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Identifikasi. Siap Opsnal merupakan keseluruhan dari tahap-tahap yang dilakukan sehingga menjadi yang terpenting dalam pelaksanaan tugas sebagai Satuan Reserse Kriminal.

Satuan Reserse Kriminal dipimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari berada di bawah kendali Wakapolres. Kepala Satuan Reserse Kriminal memiliki fungsi di bantu oleh Kepala Urusan Bina Operasional disingkat KBO yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal.

Satuan Reserse Kriminal memiliki petugas yang masing-masing bertugas dalam penanganan kasus tindak pidana, dalam penelitian ini lebih ke pidana umum. Hal ini dapat dijelaskan dalam bagan organisasi dibawah ini:

**Bagan 1. STRUKTUR ORGANISASI REVISI SAT RESKRIMPOLRESTA
YOGYAKARTA**
(Sesuai PER KAP NO. POL 10 TAHUN 2007)



Berdasarkan Bagan Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal diatas dapat dilihat jabatandari personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta terdiri dari:

- a) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dengan jabatan Komisaris Polisi
- b) WakilKepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim) dengan jabatan Ajun Komisaris Polisi
- c) Kepala Urusan Bina Operasional (Ka Ur Bin Opsnal) dengan jabatan Inspektur Polisi
- d) Badan Mitra dengan Jabatan Brigadir
- e) Pembantu Umum (Banum) dengan jabatan Pegawai Negeri Sipil
- f) Kepala Urusan Administrasi (Ka Ur Mintu) dengan jabatan Inspektur
- g) BintaraUnit (Banit) dengan Jabatan Bintara
- h) Kepala Unit Identifikasi (Ka Ur Ident) dengan jabatan Ajun Komisaris Polisi
- i) Bintara Dakti To Pol dengan jabatan Bintara
- j) Bintara Olah TKPdengan jabatan Bintara
- k) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan Jabatan Ajun Komisaris Polisi
- l) Pembantu Unit Lindung dengan jabatan Bintara
- m) Pembantu Unit Penyidik dengan jabatan Bintara

- n) Kepala Unit Penyidik I (Kanit Idik I) dengan jabatan Ajun Komisaris Polisi
- o) Kepala Unit Penyidik II (Kanit Idik II) dengan jabatan Ajun Komisaris Polisi
- p) Kepala Unit Penyidik III (Kanit Idik III) dengan jabatan Ajun Komisaris Polisi
- q) Kepala Unit Penyidik IV (Kanit Idik IV) dengan jabatan Ajun Komisaris Polisi
- r) Kepala Unit Penyidik V (Kanit Idik V) dengan jabatan Ajun Komisaris Polisi
- s) Kepala Unit Penyidik VI (Kanit Idik V I) dengan jabatan Ajun Komisaris Polisi
- t) Sub Unit I (Subnit I) dengan jabatan Inspektur
- u) Sub Unit II (Subnit II) dengan Jabatan Inspektur

Jumlah personel dari Satuan Reserse Kriminal Yogyakarta terdiri dari 115 Orang, 10 orang diantaranya merupakan anggota dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. Data Personel Satuan Reserse Kriminal Yogyakarta pada Tahun 2011

Data Jumlah Personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta Sesuai Jabatan		UNIT PPA
Kompol	1 Orang	-
AKP	8 Orang	1 Orang
IP	14 Orang	-
BA	84 Orang	9 Orang
PNS	8 Orang	-
Jumlah	115 Orang	10 Orang

(Sumber : Data Sat Reskrim Polresta Yogyakarta diambil tanggal 9 Juli 2012)

Melihat dari data diatas, struktur organisasi Polresta Yogyakarta sendiri sudah terlihat mekanisme kerjanya yang dikepalai oleh Kepala Reserse Kriminal Komisaris Polisi Andreas Deddy Wijaya dengan Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Ajun Komisaris Polisi Ilyas. Mekanisme kerja terlihat dalam *Job Description* dari bagian yang pokok dalam struktur organisasi revisi Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta adalah sebagai berikut,

1) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)

- a) Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE.

- b) Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
- c) Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
- d) Melakukan supervisi staf.
- e) Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

2) Kepala Urusan Bina Operasional (Kaur Bin Opsnal)

- a) Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Identifikasi.
- b) Membantu kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
- c) Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
- d) Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmindik, Urmin, Ur Tahti, Ur Identifikasi.
- e) Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

3) Kepala Unit (Kanit)

- a) Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
- b) Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
- c) Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
- d) Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari.
- e) Menyiapkan data-data yang ditangani.

4) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Sat Reskrim yang bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat. Selain penanganan terhadap laporan tindak pidana umum, Unit Sidik 4 PPA mengkhususkan diri dalam penanganan tindak pidana khusus yang berhubungan dengan tindak kekerasan/Eksploitasi terhadap Anak dan Perempuan.

5) Kanit Identifikasi (Ka Ident)

Unit Identifikasi bertugas melakukan identifikasi terhadap tersangka dalam hal pemeriksaan, peyidikan, dan penyelidikan kasus-kasus kriminal, kemudian dalam hal identifikasi korban kejahatan.

B. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta

Pada dasarnya pelaksanaan bantuan hukum tidak secara jelas dicantumkan dalam Pasal 56 KUHP. Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai hak tersangka yang mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum merupakan bagian dari hak yang diterima tersangka untuk mencari keadilan. Hak tersebut diperoleh agar mereka yang terkena kasus tindak pidana mendapat pendampingan hukum sampai perkaranya diproses di pengadilan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta merupakan suatu proses pemberian hak untuk tersangka dari penyidik sesuai dengan Pasal 114 KUHP yang berbunyi:

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Menurut isi Pasal tersebut dinyatakan bahwa polisi penyidik wajib memberitahukan hak-haknya kepada tersangka khususnya mengenai bantuan hukum. Jika Penyidik tidak memberitahukan hak-hak kepada tersangka maka pelaksanaan bantuan hukum tidak akan terlaksana. Tidak terlaksananya bantuan hukum ini mengakibatkan tersangka tidak didampingi Bantuan Hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Yogyakarta dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit A bidang Tindak Pidana Umum Polresta Yogyakarta. Penyidik tersebut yaitu ;

1. Kepala Unit Penyidik I dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (Kopol),
2. Polisi penyidik yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi yang berpengalaman menangani tindak pidana umum di Polresta Yogyakarta.

Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Yogyakarta adalah proses pemberian bantuan hukum dari penyidik menyediakan bantuan hukum sampai tersangka menerima bantuan hukum. Menurut wawancara peneliti dengan Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Yogyakarta akan diuraikan berikut ini:

a. Pemeriksaan Tersangka

Pada tahap pemeriksaan, sebelum tersangka diperiksa Polisi Penyidik karena melakukan tindak pidana, Polisi Penyidik memiliki tugas untuk wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai hak menerima bantuan hukum sesuai dengan Pasal 114 KUHAP. Dalam hal ini tersangka yang menerima bantuan hukum harus memiliki kartu miskin yang diperolehnya dari Kantor Kelurahan/ Kecamatan setempat. Sebelum mendapatkan bantuan hukum, tersangka yang

ingin diberi bantuan hukum harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 2) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- 3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

b. Penyediaan Bantuan Hukum

Setelah pemohon Bantuan Hukum melengkapi syarat-syarat tersebut, dalam hal penyediaan bantuan hukum, Polisi Penyidik menyediakan pemberi bantuan hukum yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Polisi penyidik tersebut. Pemberi Bantuan hukum yang disediakan berasal dari Organisasi Bantuan Hukum dan biasanya sudah memiliki hubungan baik dengan Penyidik. Setelah itu, Penyidik menyediakan pemberi bantuan hukum untuk ditunjuk sebagai penasihat hukum bagi tersangka. Beberapa calon pemberi bantuan

hukum yang ditunjuk maksimal 3 (tiga) orang untuk kemudian dipilih sendiri oleh tersangka.

c. Pemberi bantuan hukum melakukan komunikasi dengan tersangka

Masing-masing pemberi bantuan hukum melakukan pendekatan selama 3 (tiga) hari dengan tersangka untuk lebih mengenal tentang masalah hukum yang dialami tersangka.

d. Pendampingan hukum oleh pemberi bantuan hukum

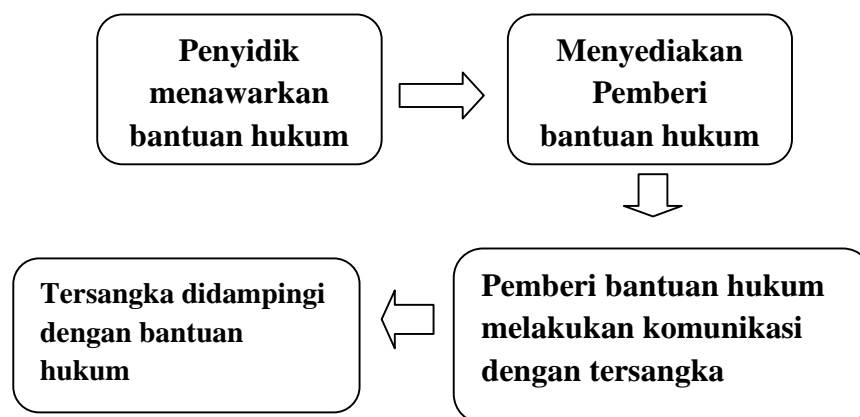
Dalam waktu tiga hari tersebut tersangka diperbolehkan untuk memilih sendiri pemberi bantuan hukumnya. Pada prinsipnya seorang tersangka diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang selengkapnya berbunyi :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Apabila ditarik kesimpulan dari ketentuan yang mengatur tersangka yang wajib didampingi penasihat hukum, maka dapat dimengerti bahwa, tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum adalah : (a) diancam dengan pidana mati; (b) diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih; (c) tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Untuk mempermudah pemahaman dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Bagan 2. Proses Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta



(Sumber: Hasil Wawancara dengan Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2012)

Pada kenyatannya, pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ada tersangka yang tidak terpenuhi haknya untuk didampingi bantuan hukum.

Dari data Reskrim dapat dijelaskan bahwa masih marak tindak kriminalitas yang terjadi di lingkup wilayah sekitar Kota Yogyakarta.

Kasus-kasus yang sering terjadi menurut data tersebut yaitu pencurian kendaraan bermotor berjumlah 197 kasus, pencurian berat berjumlah 363 kasus, pencurian dengan kekerasan berjumlah 107 kasus dan sebagainya. Menurut KUHP kasus-kasus diatas seperti pencurian dengan kekerasan, curanmor, kesusilaan, penganiayaan berat semuanya diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun bahkan lebih. Hal ini membuat pihak kepolisian perlu memperhatikan pentingnya pemberian bantuan hukum bagi tersangka, khususnya bagi tersangkayang tidak mampu(miskin) yang wajib didampingi bantuan hukum ataudidampingi oleh bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP. Berikut ini merupakanbeberapa contoh uraian kasus yang tersangkanya tidak mampu (miskin) yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih menurut KUHP. Dua diantara kasus di bawah ini akan diuraikan pelaksanaan bantuan hukumnya;

Tabel 4. Beberapa Uraian Kasus Kejahatan Tahun 2010 -2011 Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta yang Diancam Pidana Lima Tahun atau Lebih

No.	Tgl.	No/Tgl/LP	Kasus	Tersangka	Korban	Bantuan Hukum
1	18 Oktober 2010	LP-B/19/XI/2009/DIY .Tabes/SEK MG/22 November 2010	Curanmor Melanggar Pasal 363 KUHP	Redi Setiawan	Endang Sukeni	Tidak didampingi bantuan hukum
2	18 Oktober 2010	Lp/17/III/2010/DI Y/Tbs Yka/Sek Jt/ 19 Maret 2010	Jambret Melanggar 362 Pasal KUHP	Bhaskara Firmansyah	Surya Ismiko	Tidak didampingi bantuan hukum
3	2 Februari 2011	LP/05/1/2011/DIY/ Resta Yka 3 Januari 2011	Penganiayaan Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP	Endra Eka Putra	Warjito Edi	Tidak didampingi bantuan hukum
4	25 Mei 2011	LP/149-B/III/2011/DIY/ Resta Yka/ SEK Gt	Curanmor Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP	Bambang Sucipto	Agung Nurmantoro	didampingi bantuan hukum
5	20 Juni 2011	LP/180/IV/2011/D IY/Resta Yka/ SEK UH 16 April 2011	Curanmor Melanggar Pasal 363 KUHP	Reno Saktiawan	Ponijan	Tidak didampingi bantuan hukum
6	30 Juni 2011	LP/ 48/ II/ 2011/ DIY/ Resta Yka 15 Februari 2011	Curanmor Melanggar Pasal 363 KUHP	Agung Prasetyo	Ali Umar	Tidak didampingi bantuan hukum
7	20 Juli 2011	LP/ 191 B/ IV/ 2011/ DIY/ Resta Yka 30 April 2011	Pembunuhan Melanggar Pasal 340 Sub Pasal 351 Ayat (3) KUHP	Joko Wibowo	Mamudin	tidak didampingi bantuan hukum
8	15 September 2011	LP/47-B/XI/2010/ DIY/ Tabes Yka / Sek WB 8 September 2011	Curanmor Melanggar Pasal 363 KUHP	Freindy	Sumary	Tidak didampingi bantuan hukum
9	1 November 2011	LP/70/VIII/2011/D IY/Resta/SEK	Curanmor Melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP	Mohammad Lokman	Heri Mardiyanta	Tidak didampingi bantuan hukum
10	22 Desember 2011	LP/496-B/XI/2011/DIY/Re sta Yka 1 November 2011	Curanmor Melanggar Pasal 363 KUHP	Gatot dan Rohmat Hadiatmoko	Novi Andika sakti	didampingi bantuan hukum

(Sumber: Data Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, diambil tanggal 28 Juni 2012)

Dari Tabel 4 (empat) diatas, sebagai contoh dipilih dua kasus untuk dianalisis bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukumnya. Alasan dua kasus yang dipilih karenaberdasarkan kasus yang terberatdan karena alasan keterbatasan ijin untuk melihat Berita Acara Pemeriksaan(BAP) serta kasus yang didampingi penasehat hukum dan yang tidak didampingi penasehat hukum. Kedua kasus yang dipilih tersebut adalah kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor)diambil dari Tabel 4 (empat) Nomor 4 (empat) dan kasus pembunuhan dan penganiayaanyang diambil dari Tabel 4 (empat) nomor 7 (tujuh) yang akandiuraikan pelaksanaan pemberian bantuan hukumnya sebagai berikut:

a. Kasus pencurian kendaraan bermotor(LP/149-B/III/2011/DIY/ Resta Yka/ SEK Gt)

Kasus yang pertama, analisis tentang kasus pencurian kendaraan bermotor yang diuraikan dari Tabel 4 (empat) nomor 4 (empat), penyidik melakukan penunjukkan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka. Pada tanggal 25 Mei 2011 (berdasarkan surat No. Pol. B / 149 / III / 2011 / Reskrim) penyidik menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka. Dalam berita acara pemeriksaan, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan pada tanggal 10 Juni 2011 Namun setelah berlangsung dua hari pada tanggal 12 Juni 2012 penunjukan penasehat hukum baru mulai dilakukan. Dalam jangka waktu tersebut berarti tersangka sama sekali tidak didampingi oleh penasehat hukum. Menurut

penyidik, jika tidak segera melakukan penunjukkan hukum maka BAP tidak akan sah dan berkas perkara tidak lengkap untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Melihat kasus tersebut ternyata sebelum pemeriksaan dimulai, tersangka tidak diberitahukan hak-haknya oleh penyidik untuk mendapat bantuan hukum. Sesuai dengan Pasal 114

KUHAP yang berbunyi :

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Seharusnya penyidik lebih dapat memahami hak-hak tersangka dalam menegakkan aturan-aturan dalam KUHAP sehingga tidak terjadi kerugian dalam penegakkan hak asasi tersangka.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHAP dan hasil wawancara peneliti dengan penyidik, penyidik dalam memberikan bantuan hukum telah melakukan kewajibanya. Namun penunjukan penasehat hukum/ pemberian bantuan hukumnya sangat terlambat, seharusnya penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kasus diatas sudah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

b. Kasus pembunuhan dan penganiayaan (LP/ 191 B/ IV/ 2011/DIY/ Resta Yka)

Kasus yang kedua yaitu kasus pembunuhan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diperiksa dan didengar keterangannya selaku tersangka perkara tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dan penganiayaan terjadi di Hotel Wilis, Jalan Sultan Agung No. 12 Yogyakarta pada hari Selasa 20 Juli 2011 dengan menggunakan pisau mengakibatkan seorang korban mengalami luka tusuk dan akhirnya meninggal dunia. Atas dasar perbuatan tersebut tersangka melanggar Pasal 340 KUHP Sub Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Pada hari Selasa tanggal 1 November 2011 diperiksa oleh penyidik yang berpangkat Briptu, jabatan Banit III Sat Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Polresta Yogyakarta, berdasarkan Skep Kapolres No. Pol : LP/ 191 B/ IV/ 2011/DIY/ Resta Yka. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik terlebih dahulu disampaikan kepada yang diperiksa terutama hak-haknya yang menyangkut bantuan hukum. Pada saat tahap pemeriksaan, penyidik menanyakan kepada tersangka untuk didampingi bantuan hukum sesuai Pasal 114 KUHP. Pertanyaan yang diajukan yaitu:

1) Pertanyaan penyidik : Dalam perkara yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini, apakah saudara akan menggunakan bantuan hukum/pengacara untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini.

2) Jawaban tersangka : Dalam perkara yang dipersangkakan kepada saya sekarang ini saya tidak akan menggunakan pengacara hukum dalam pemeriksaan ini dengan alasan saya masih mampu menghadapinya sendiri.

Dalam pemeriksaan ini, Penyidik mengambil kesimpulan bahwa tersangka tidak didampingi bantuan hukum. Terlihat bahwa penyidik masih kurang paham dengan penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP, padahal sebelum memulai penyidikan, tersangka terlebih dahulu diberitahukan tentang hak-haknya sebagai tersangka. Seharusnya alasan tersangka dalam BAP bahwa tersangka masih bisa menghadapi sendiri tindak pidana yang disangkakan, tidak dijadikan acuan untuk tidak menyediakan bantuan hukum. Karena tersangka dalam kasus di atas berdasarkan perbuatannya diancam dengan hukuman mati atau hukuman lima belas tahun atau lebih. Dalam ancaman hukuman di atas untuk tersangka yang miskin wajib disediakan bantuan hukum. Pada intinya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang miskin dengan ancaman hukuman tersebut wajib didampingi oleh bantuan hukum. Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1).

Berdasarkan dua uraian kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa masih ada keterlambatan pemberian bantuan hukum serta Polisi penyidik masih kurang memahami tentang pemberian bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa tersangka wajib didampingi penasihat hukum. Khusus untuk tersangka yang tidak mampu/ miskin dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, berhak mendapat bantuan hukum yang disediakan oleh penyidik.

Dalam penerapannya di Polresta Yogyakarta terkait dengan pelaksanaan Pasal 115 KUHP sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian lapangan, untuk tersangka yang didampingi bantuan hukum, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak mampu (miskin), penyidik sudah memberikan kesempatan kepada pemberi bantuan hukum untuk mengikuti proses pendampingan pada tahap pemeriksaan namun prakteknya belum maksimal. Berdasarkan wawancara kami dengan polisi penyidik Reskrim Polresta Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2012 Menyatakan :

Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum bagi tersangka, Walaupun ada pembatasan pendampingan dalam Pasal 115 KUHP namun kami beserta jajaran penyidik berusaha tidak menghalangi penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan, hal ini untuk menjaga kepastian hukum bagi tersangka, namun dalam hal pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik penasehat hukum tidak biasa mengintervensi pertanyaan yang diberikan. Penasehat hukum hanya dapat mendengar, melihat dan menyaksikan jalannya pemeriksaan. Fungsi penasehat hukum hanya bersifat kordinatif dalam pemeriksaan penyidik, artinya penasehat hukum

diperkenankan untuk menjelaskan kepada tersangka hal-hal yang menurut pertanyaan penyidik kurang dimengerti.

Penerapan Pasal 115 yang mengatur kedudukan penasehat hukum pada proses pemeriksaan penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, tetapi untuk menjaga kepastian hukum penyidik harus dapat mengimplementasikan maksud dari undang-undang agar bersifat fleksibel sepanjang hak yang diberikan penasehat hukum tidak mengganggu jalannya pemeriksaan.

Selain itu, agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Yogyakarta berjalan optimal diharapkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan, pemberi bantuan hukum selalu berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. Pemberi bantuan hukum berhak menghubungi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan dan berhak melakukan hubungan pembicaraan pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan pembelaannya. Setiap hubungan dan pembicaraan pemberi bantuan hukum dengan tersangka dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik. Hubungan ini dimaksudkan agar tersangka dapat berkonsultasi tentang perkara yang dihadapinya dan menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian kasus hukum tersebut.

C. Kendala-kendala yang Ditemui Polresta Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta

Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka masih banyak kendala yang ditemui. Beberapa kendala tersebut yaitu:

1. Terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Yogyakarta

Terkait dengan dana bantuan hukum di Polresta Yogyakarta untuk mewujudkan pemberian bantuan hukum tersebut masih mengalami kendala. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa Pemerintah daerah tidak dibebani kewajiban menyediakan anggaran bantuan hukum. Pada akhirnya alokasi anggaran untuk bantuan hukum kurang tersedia. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta juga belum memuat tentang alokasi dana Bantuan Hukum. Oleh karena itu, dana yang diperoleh adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk membiayai pemberi bantuan hukum dan untuk berperkara. Dana yang

disediakan untuk pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang miskin yaitu dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. Anggaran dana Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) dan diancam pidana lima tahun atau lebih di Polresta Yogyakarta

Perkara Pidana	Biaya perkasus	Biaya yang tersedia
Perkara prodeo	Rp 5.000.000,00	Rp. 2.500.000,00 - Rp. 3.000.000,00
Perkara non prodeo	-	-

(Sumber : Data anggaran Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta)

Berdasarkan Tabel 5 (lima) di atas ternyata dana bantuan hukum yang dibutuhkan sekitar Rp 5.000.000,00 perkasus sedangkan dana yang tersedianya sekitar Rp 2.500.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00 perkasus. Dengan demikian masih ada kekurangan dana sekitar Rp 2.000.000,00. Kekurangan dana inilah yang menyebabkan pemberi bantuan hukum mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta menunjukkan bahwa pihak kepolisian juga mengeluarkan biaya pribadi dalam hal pembayaran penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin). Polisi Penyidik menamakannya dengan istilah uang prodeo.

2. Ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum masih belum tercukupi

Ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta masih belum tercukupi. Menurut polisi penyidik yang sudah beberapa kali

menangani kasus tindak pidana, kurang tersedianya pemberi bantuan hukum menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta. Maraknyatindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin) membuat Polresta Yogyakarta membutuhkan delapan sampai sepuluh pemberi bantuan hukum. Namun, Pemberi Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta hanya tersedia tiga Pemberi Bantuan Hukum. Dengan demikian Polresta Yogyakarta masih membutuhkan lima sampai tujuh pemberi bantuan hukum untuk memenuhi ketersediaan pemberi bantuan hukum agar menjadi seimbang.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yaitu, personil Polisi Penyidik di Polresta Yogyakarta. Polisi penyidik masih mengalami kendala karena ada sebagian dari polisi penyidik yang kurang memahami tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin). Dalam hal ini, pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilaksanakan sebelum pemeriksaan tersangka oleh penyidik. Saat inilah petugas menanyakan apakah tersangka ingin didampingi penasehat hukum atau tidak. Sesuai Pasal 114 KUHP, Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka khususnya untuk menerima bantuan hukum. Jika penyidik tidak memberitahukan, maka pelaksanaan bantuan hukum tidak dapat dilaksanakan. Dari data informasi Polisi Penyidik Di Polresta Yogyakarta masih ada sebagian petugas penyidik yang kurang paham tentang hak tersangka untuk mendapat

bantuan hukum khususnya bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini yang menyebabkan penyidik akhirnya tidak menyediakan penasihat hukum dan hanya menyediakan surat penolakan untuk didampingi bantuan hukum yang ditandatangani oleh tersangka.

D. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta

Upaya polisi penyidik di Polresta Yogyakarta dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka sebagai upaya untuk mengurangi kendala yang muncul ketika proses pelaksanaan bantuan hukum. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya terlaksana, sehingga hambatannya masih ada. Upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta

Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan mengajukan dana alokasi yang sesuai untuk membiayai bantuan hukum, agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu (miskin) secara gratis sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) KUHAP.

pada kenyataannyasesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dana untuk memberikan bantuan hukum tidak wajib diberikan ke setiap daerah,sehingga Pemerintah Daerah berhak memberikan dana Bantuan hukum atau tidak. Hal ini membuat daerah kurang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Komitmen inilah yang seharusnya Pemerintah Daerah lakukan untuk mewajibkan anggaran dana Bantuan Hukum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD). Dengan demikian alokasi dana bantuan hukum dapat terpenuhi untuk masyarakat yang tidak mampu yang mencari keadilan.Untuk mengatasi kendala ini, upaya yang dilakukan Polresta Yogyakarta adalah melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerahterkait dana Bantuan HukumsehinggaPemerintah daerah dapat mengalokasikan dananya dalam hal pengalokasian dana bantuan hukum tersebut.

2. Meningkatkan ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin)

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum terhadap tersangka yang tidak mampu (miskin) yakni, meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan Lembaga Bantuan Hukum.Dengan melakukan kerjasama ini, maka kebutuhan pemberi bantuanhukum untukmendampingi tersangka yang tidak mampu (miskin)terpenuhi dan menjadi seimbang.

Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum juga telah dilakukan dengan cara melakukan komunikasi mengenai Bantuan Hukum gratis bagi masyarakat yang miskin. Salah satu caranya yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak dan penasehat hukum lewat POLMAS (Polisi Masyarakat). Program tersebut diadakan oleh Polresta Yogyakarta setiap setahun sekali di sepanjang Jalan Nol Kilometer perempatan Malioboro dengan cara mendirikan posko-posko. Tujuan didirikannya posko-posko yakni menjalin kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai bantuan hukum dapat mengunjungi posko tersebut. Sosialisasi yang diberikan Polisi Masyarakat tersebut yakni tentang pentingnya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) dan menjelaskan bahwa masyarakat tidak mampu (miskin) yang tersandung tindak pidana mempunyai hak-hak untuk mendapatkan keadilan khususnya memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum, proses penyidikan perkara pidana dapat berlangsung seimbang dan tersangka tidak takut lagi ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan pada saat melakukan pemeriksaan atau penyidikan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu profesionalisme polisi penyidik untuk mengatasi kurangnya pemahaman

polisi penyidik terhadap hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, upaya yang dapat dilakukanyaitu mengikut sertakan 3 (tiga) orang polisi penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum yang diadakandi Polresta Yogyakarta. Sosialisasi juga dilakukan denganbekerjasama antara Polisi Penyidik Polresta Yogyakarta denganLembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.Sosialisasi ini bertujuanuntuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi polisi penyidiktentanghak-hak tersangka yang tidak mampu/ miskin untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta

Pada dasarnya bila dilihat dari segi yuridis normatif, KUHAP secara jelas telah mengatur tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka yang terindikasi melakukan tindak pidana kejahatan, khususnya pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta. Kewenangan pihak penyidik cukup besar dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang miskin dan diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yaitu ketika penyidik memberitahukan hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum.

Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Yogyakarta adalah proses pemberian bantuan hukum dari penyidik menyediakan bantuan hukum sampai tersangka menerima bantuan hukum. Tahap yang dilakukan yaitu pemeriksaan tersangka, penyediaan bantuan hukum, pemberi

bantuan hukum melakukan komunikasi dengan tersangka, pendampingan hukum oleh pemberi bantuan hukum.

Bila dilihat pada pelaksanaan di lapangan dapat diketahui bahwa hal yang sangat mendasar dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka adalah ketika polisi penyidik memberitahukan hak kepada tersangka yang miskin yang diancam lima tahun atau lebih untuk mendapat bantuan hukum secara gratis. Kepolisian khususnya pihak penyidik seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, khususnya Pasal 54 dan 56. Jika tidak dilaksanakan maka mengakibatkan hak-hak tersangka tidak terlindungi secara nyata, akan ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan bantuan hukumnya seperti keterlambatan penunjukkan penasehat hukum dan dalam penyusunan BAP yang dikejar waktu Penyidik hanya dapat memberitahukan bahwa tersangka dapat menerima bantuan hukum namun tidak menyediakan bantuan hukum, hal ini tentu saja merugikan tersangka dilihat dari segi perlindungan hak asasinya dan hak-haknya sebagai warga negara.

2. Kendala-kendala yang ditemui Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta

Ada beberapa kendala yang dialami oleh Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan bantuan hukum yaitu:

- a. Terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu/miskin di Polresta Yogyakarta

Ketersediaan dana di Polresta Yogyakarta dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu atau miskin adalah Rp 2.500.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00 perkasus,. Padahal dana yang dibutuhkan sekitar Rp 5.000.000,00 perkasus. Dengan demikian masih ada kekurangan dana sekitar Rp 2.000.000,00. Dengan demikian, kekurangan dana yang diperlukan di Polresta Yogyakarta untuk pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang miskin dipenuhi oleh pemberi bantuan hukum dan polisi penyidik. Polisi penyidik menamakannya dengan istilah "uang prodeo".

- b. Ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum masih belum tercukupi/memadai

Kebutuhan pemberi bantuan hukum di Polresta Yogyakarta masih kurang/ belum memadai. Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin) menyebabkan Polresta Yogyakarta membutuhkan delapan sampai sepuluh pemberi bantuan hukum. Akan tetapi Pemberi Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta hanya tersedia tiga Pemberi Bantuan Hukum. Dengan demikian Polresta Yogyakarta masih membutuhkan lima sampai tujuh pemberi bantuan hukum untuk memenuhi ketersediaan pemberi bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu/miskin agar ada keseimbangan.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yaitu, personil polisi penyidik di Polresta Yogyakarta. Dari data informasi Polisi Penyidik Di Polresta Yogyakarta masih ada sebagian petugas penyidik yang kurang paham tentang hak tersangka yang tidak mampu atau miskin untuk mendapat bantuan hukum khususnya bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini yang menyebabkan penyidik akhirnya tidak menyediakan penasehat hukum dan hanya menyediakan surat penolakan untuk didampingi bantuan hukum yang ditandatangani oleh tersangka.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta

Upaya-upaya yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka yang tidak mampu/miskin di Polresta Yogyakarta:

a. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu di Polresta Yogyakarta

Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, antara lain dengan memaksimalkan alokasi dana yang sesuai untuk membiayai Organisasi Bantuan Hukum agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak

mampu/miskin. Pada kenyataannya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dana untuk memberikan bantuan hukum tidak wajib diberikan ke setiap daerah. Sehingga Pemerintah Daerah kurang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Komitmen inilah yang seharusnya Pemerintah Daerah lakukan untuk mewajibkan anggaran dana Bantuan Hukum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian alokasi dana tersebut dapat terpenuhi untuk masyarakat yang tidak mampu yang mencari keadilan.

b. Meningkatkan ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin)

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) yakni, dengan cara menjalin kerjasama atau koordinasi antara kepolisian dengan Lembaga Bantuan Hukum, sehingga ada keseimbangan antara tersangka yang tidak mampu/miskin dengan pemberi bantuan hukum yang diperlukan Polresta Yogyakarta. Program tersebut dilakukan dengan cara mendirikan posko-posko oleh Polresta Yogyakarta yang diselenggarakan setiap setahun sekali di sepanjang Jalan Nol Kilometer perempatan Malioboro. Posko yang didirikan oleh Polresta Yogyakarta berfungsi untuk menjalin kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi dapat mengunjungi posko tersebut.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu profesionalisme polisi penyidik untuk mengatasi kurangnya pemahaman polisi penyidik terhadap hak tersangka yang tidak mampu/miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengikut sertakan 3 (tiga) orang polisi penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum yang diadakan di Polresta Yogyakarta. Sosialisasi tersebut juga dilakukan dengan bekerjasama antara Polisi Penyidik Polresta Yogyakarta dengan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi polisi penyidik tentang hak-hak tersangka yang tidak mampu/ miskin untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Yogyakarta direkomendasikan beberapa saran bagi Polresta Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu/miskin yang diancam pidana lima tahun atau lebih di Polresta Yogyakarta hendaknya polisi lebih meningkatkan pelayanan dalam proses pemberian bantuan hukum kepada tersangka dengan

cara bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum guna terpenuhinya pemberian bantuan hukum .

2. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar Polresta Yogyakarta mengikutsertakan polisi penyidik untuk mengikuti penyuluhan atau sosialisasi hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu/miskin untuk menambah pengetahuan dan wawasan polisi penyidik tentang hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum.
3. Bagi Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu/miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan cara mengalokasikan dana yang sesuai untuk membiayai Organisasi Bantuan Hukum agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu/miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI. (1984). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Semarang: Aneka Ilmu
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (1994). *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Binacipta
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Burhan Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djoko Prakoso. (1985). *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ishaq. (2010). *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril. (2010). *Hukum Acara pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia
- Moleong ,Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- _____. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Sanapiah Faisal. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh Malang
- Satjipto Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing

Soerjono Soekanto. (1987). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali

Soerjono Soekanto. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Suharsimi Arikunto. (1991). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Data Satreskim Polresta Yogyakarta diambil tanggal 28 Februari 2012

Data satreskrim Polresta Yogyakarta diambil tanggal 22 Juni 2012

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum

Internet :

Arrahmah.com.(<http://arrahmah.com/read/2012/08/29/22766-tak-didampingi-kuasa-hukum-sidang-perdana-iwan-walet-ditunda.html#>) diakses tanggal 20 September 2012

Wordpress.com.(<http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2009/11/28/h>) diakses tanggal 13 Maret 2012

Artikel Bantuan Hukum.([http:// www.library.upnvj.ac.id/](http://www.library.upnvj.ac.id/)) diakses tanggal 10 Maret 2012

(<http://lbhmawarsaronsemarang.org>) diakses tanggal 20 Februari 2012
diakses pada tanggal 20 Februari 2012

www.Republika.(<http://republika.co.id.12/02/09/lz46pb-penduduk-yogya-berkurang-17525-jiwa-setahun>) diakses tanggal 3 Juli 2012

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wakasat Reskrim dan Polisi Penyidik Polresta Yogyakarta

1. Apa saja program Reskrim di Polresta Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas Reskrim?
2. Apa saja tugas pokok Reskrim dibidang kriminalitas? Khususnya dalam tindak pidana umum?
3. Siapakah petugas yang berwenang dalam menangani pidana umum?
4. Siapakah petugas yang terlibat langsung dalam proses pemberian Bantuan Hukum kepada Tersangka?
5. Bagaimanakah proses advokasi hak tersangka pada tahap pelaksanaan Bantuan Hukum?
6. Seberapa pentingkah Bantuan hukum di Polresta yogyakarta?
7. Apakah Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi tersangka di perlukan di Polresta Yogyakarta?
8. Mulai tahap apakah penyidik menawarkan mengenai Bantuan Hukum?
9. Berapa banyak kasus pidana umum yang ditangani sat reskrim yang tersangkanya tidak didampingi penasehat hukum?
10. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemberian Bantuan hukum secara cuma-cuma di Polresta Yogyakarta?
11. Apakah Bantuan Hukum secara cuma-cuma sudah dilaksanakan secara optimal?
12. Bagaimanakah prosedur yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan Bantuan Hukum?
13. Apakah Prosedur Bantuan hukum menggunakan pengacara sendiri dan Bantuan Hukum secara Cuma-cuma berbeda?
14. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum cuma-Cuma?
15. Pertanyaan-pertanyaan apa sajakah yang diajukan penyidik terkait Bantuan Hukum?
16. Apa sajakah kekeliruan yang pernah dilakukan penyidik pada saat pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum?
17. Apakah Penyidik selalu menawarkan Bantuan Hukum kepada tersangka? Khususnya bagi yang tidak mampu?
18. Mengapa pada saat menawarkan bantuan Hukum masih ada tersangka yang tidak didampingi Bantuan Hukum?
19. Bagaimanakah proses pelaksanaan Bantuan Hukum bagi tersangka yang dihukum 5(lima) tahun bahkan lebih?
20. Bagaimanakah penunjukan penasehat hukumnya?

21. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta?
22. Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
23. Adakah lembaga khusus yang ditunjuk kepolisian untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Bantuan Hukum?
24. Apakah yang seharusnya diupayakan kepolisian demi terwujudnya pelaksanaan Bantuan Hukum?
25. Apakah Pemda memperhatikan mengenai pelaksanaan Bantuan hukum khususnya bagi tersangka yang tidak mampu?
26. Bagaimanakah tanggapan penyidik mengenai pemda yang kurang memperhatikan masalah dana mengenai Bantuan hukum?

B. Kepala Unit Penyidik I (Kanit Idik I) dan Kepala Urusan Bina Opsional

1. Berapa banyak kasus pidana umum yang ditangani sat reskrim yang tersangkanya tidak didampingi penasehat hukum?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Bantuan hukum secara cuma-cuma di Polresta Yogyakarta?
3. Apakah Bantuan Hukum secara cuma-cuma sudah dilaksanakan secara optimal?
4. Bagaimanakah prosedur yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan Bantuan Hukum?
5. Apakah Prosedur Bantuan hukum menggunakan pengacara sendiri dan Bantuan Hukum secara Cuma-cuma berbeda?
6. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum cuma-Cuma?
7. Pertanyaan-pertanyaan apa sajakah yang diajukan penyidik terkait Bantuan Hukum?

C. Penasehat hukum

1. Apa saja kendala yang dialami penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka?
2. Apakah Penasehat hukum mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah?
3. Apakah penasehat hukum bekerjasama secara baik dengan lembaga kepolisian?
4. Apakah penasehat hukum mengeluarkan biaya untuk memberikan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu?
5. Bagaimana penasehat hukum memberikan bantuannya kepada tersangka yang tidak mampu?

Contoh

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA BESAR YOGYAKARTA
SEKTOR GEDONGTENGGEN
Jl. Jlagran No. 12 Yogyakarta Telp 512696
Pro Justisia :

Nomor : B/ /2011/DIY/ Resta Yka/ SEK GT
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Penasehat hukum untuk
Mendampingi tersangka

Yogyakarta, Oktober 2011

Kepada :

Yth. Edi Suharyono, SH
D/a Jl. Ahmad Jajuli
No 69 Kota baru

Di
Yogyakarta

1. Dasar

- a. Undang-Undang No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
- b. Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No 08 Tahun 1981 tentang KUHP
- c. Pasal 22 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- d. Laporan Polisi No Pol B / 149 / III / 2011 / DIY / Tabes Yka/ Sektor Gt, tanggal 25 Mei 2011 ttng perkara tindak pidana Pencurian Kendaraan bermotor.

2. Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2000 sebelas, telah terjadi tindak pidana Pencurian Kendaraan bermotor yang dilakukan oleh tersangka :

Nama : Bambang Sucipto
TTL : Yogyakarta/ 16 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warganegara : WNI
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Kp. Sutodirjan GT II/ 902 Rt 073 Rw 021 Kel.
Pringgokusuman

3. Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan pada bagi pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati/ ancaman pidana lima belas tahun/ lebih dari lima tahun / yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, bersama ini dimohon kepada saudara untuk berkenan memberikan pendampingan / bantuan hukum/ bertindak menjadi penasehat hukum bagi tersangka dimaksud secara cuma-cuma.

4. Demikian surat penunjukkan ini disampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GEDONGTENGGEN
KANIT RESKRIM


TJARAM ARIE.S
NRP 54043117

Contoh

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA BESAR YOGYAKARTA
POLRESTA YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan (Ngupasan, Gondomanan) No. 1 Resta Yka
Pro Justisia :**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HAK UNYUK DIDAMPINGI
PENASEHAT HUKUM YANG TELAH DITUNJUK / DISEDIAKAN OLEH PENYIDIK**

----Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Joko Wibowo
TTL	: Yogyakarta /23 Juli 1968
Warganegara	: laki-laki
Agama	: Islam
Warganegara	: WNI
Pekerjaan	: Swasta

----Sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang disangkakan kepada saya yang terjadi pada hari Selasa 2 Agustus 2011 sekitar jam 22.00 WIB Jl. Reksobayan Nomor 1 Resta Yka yang penyidikannya sedang dilakukan oleh penyidik Polresta Yka, dan kepada saya selaku tersangka telah disampaikan apa-apa yang menjadi tersangka, dalam menghadapi proses penyidikan atas diri saya menyatakan “ tidak menggunakan hak untuk didampingi penasehat hukum yang telah ditunjuk /disediakan oleh penyidik “ dan dalam menghadapi proses penyidikan ini akan saya hadapi sendiri.

---- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan / tekanan dari pihak penyidik dan diperkat pernyataan saya tersebut diatas saya telah membubuhkan tanda tangan sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

Yogyakarta 2 Agustus 2011

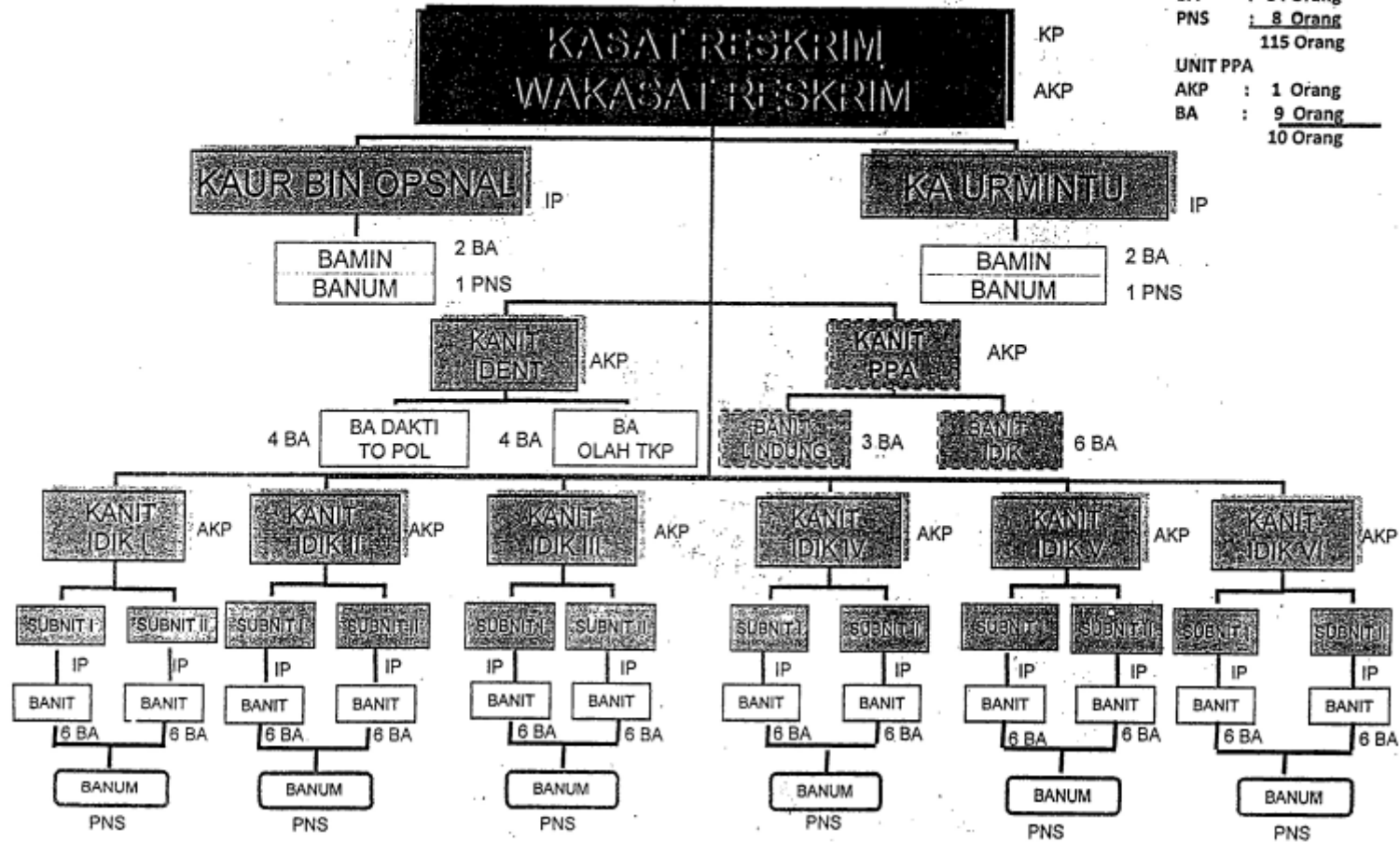
Yang membuat Pernyataan



Joko Wibowo

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA

STRUKTUR REVISI ORGANISASI SAT RESKRIM





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Kampus Karang Malang, 55281, Telp. 586168 psw.247, 248, 249, (0274) 548202, Fax
(0274) 548201 Website : <http://www.fise.uny.ac.id> e-mail : fise@uny.ac.id

Nomor : 1808 /UN.34.14/PL/2012

19 JUN 2012

Lampiran : 1 bendel proposal

Hal : Permohonan izin Penelitian

Kepada Yth : Kepala Polresta Yogyakarta
Di Tempat

Dengan hormat kami bermaksud memintakan izin mahasiswa atas nama :

Nama : Rini Agustine
NIM : 08401244016
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Maksud/Tujuan : Mencari data untuk Penelitian Tugas Akhir Skripsi
Judul Tugas Akhir : " PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI
POLRESTA YOGYAKARTA "

Atas perhatian dan izin yang diberikan kami ucapkan terimakasih



1. Ketua Jurusan PKn & H FIS
2. Ka.Subdik FIS
3. Mahasiswa Yang bersangkutan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jln.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / B 127 / VI / 2012 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : RINI AGUSTINE
No. Mahasiswa : 08401244016
Fakultas : Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Alamat : Karang Malang Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S 1).
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

*** PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA
DI POLRESTA YOGYAKARTA ***

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, Juni 2012
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT RESKRIM
KEPALAWAKASAT
ILYAS
AKP NRP/62120348